**IMPLEMENTATION OF PARKING SERVICE RETRIBUTION IN
THE EDGE OF THE PUBLIC DISTRICT, TUALANG DISTRICT
BASED ON PERDA REGENCY OF SIAK NUMBER 21
YEAR 2011**

Elsi Radika Putri¹, Hambali², Jumili Arianto³
Email: elsi.radika5306@student.unri.ac.id¹, unri.hambali@yahoo.com²,
jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Phone Number: 081365134994

*Pancasila and Civic Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research is motivated by problems that arise in the field that are not in accordance with the policy, it is assumed that the service of parking attendants has not been maximized and the imbalance between the number of parking points and the number of parking attendants available in implementing parking levies is certainly unfortunate given the large amount of potential revenue the area obtained by Siak Regency if the amount of human resources to collect parking fees is adequate. In the administration of parking service fees on public roads, constraints arise in the implementation of parking service fees. The lack of local government socialization about the location points of parking service charges on the side of the public road so that many people who use illegal fees (levies) on the subject of parking fees and the ignorance of the subjects about what they pay, about what fees they pay to the government regions increasingly make these individuals carry out payment routines that do not have a clear legal basis in either the law or regional regulations, parking attendants or officers in charge of collecting parking usually raise the rates set by the local government.*

Key Words: *Policy Implementation, Parking Fees, Inhibiting Factors.*

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011

Elsi Radika Putri¹, Hambali², Jumili Arianto³

Email: elsi.radika5306@student.unri.ac.id¹, unri.hambali@yahoo.co², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No. Hp: 081365134994

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang muncul di lapangan yang tidak sesuai dengan kebijakan tersebut diasumsikan bahwa belum maksimalnya pelayanan juru parkir dan tidak seimbangnya antara jumlah titik parkir dengan jumlah juru parkir yang tersedia dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, tentu ini sangat disayangkan mengingat besarnya potensi pendapatan daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Siak. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum ini juga dijabarkan secara deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. jika jumlah sumber daya manusia untuk memungut retribusi parkir tersebut memadai. Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir diantaranya. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para subjek tentang apa yang mereka bayar, tentang retribusi apa yang mereka bayarkan ke pemerintah daerah semakin membuat para oknum tersebut melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam undang-undnag maupun peraturan daerah, juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Retribusi parkir, Faktor Penghambat.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki salah satu hak yaitu memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir. Potensi dalam pendapatan retribusi parker di tepi jalan umum di Kabupaten Siak terutama di Kecamatan Tualang cukup besar. Tujuan diberlakukan Perda Nomor 21 Tahun 2011 ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dari berbagai retribusi pemerintah Kabupaten Siak retribusi jasa umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kecamatan Tualang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah, objek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi pelayanan parkir diantaranya. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir dan ketidaktahuan para subjek tentang apa yang mereka bayar, tentang retribusi apa yang mereka bayarkan ke pemerintah daerah semakin membuat para oknum tersebut melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam undang-undang maupun peraturan daerah, juru parkir atau petugas yang bertugas memungut parkir biasanya menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan ada tiga titik parkir di Kecamatan Tualang. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai Januari 2020. Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research*) adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Teknik purposive sampling adalah peneliti ini adalah peneliti tidak menjadikan semua informan, tetapi peneliti memiliki informasi yang pandangan cukup tahu tentang Implementasi Retribusi Parkir di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Berdasarkan teori di atas peneliti mengambil sample yaitu 16 orang yang terdiri Dinas Perhubungan, Koordinator parkir, juru parkir dan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila,peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono,2012).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas wawancara itu. Wawancara juga dilakukan secara informal tanpa aturan khusus, dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan suasana yang lebih santai, maupun formal dengan waktu tertentu, dengan peranyaan yang sudah disusun (Nasution dalam Sugiyono 2017).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif metode dokumentasi ini juga dapat digunakan untuk menggungkap data yang bersifat administratif, geografis, monografis daerah, historis dan kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan penelitian kehidupan masyarakat rokan hulu. Kemudian penelitian juga akan melakukan dokumentasi yakni dengan cara melakukan pemotretan terhadap apa yang terjadi yang berhubungan dengan permasalahan didalam penelitian ini (Arikunto, 2012).

Teknik Analisis Data

1. Proses reduksi

Data proses reduksi data merupakan proses penyeleksian dan pemilihan semua data temuan dari lapangan (lokasi penelitian) yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pada sanksi dan manfaat terhadap perkawinan sesuku di desa Lubuk Bendahara kabupaten Rokan Hulu. Reduksi data berfungsi untuk menggolongkan, menajamkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu sehingga interpretasi bisa ditarik.

2. Proses penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari survey disusun kedalam urutan teks yang bersifat naratif sehingga strukturnya dapat dipahami. penyajian data bertujuan untuk memudahkan dan membaca serta menarik kesimpulan.

3. Proses penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, berdasarkan hasil yang dikumpulkan dengan dianalisis terlebih dahulu sehingga bisa dipahami secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan penelitian lebih kurang 1 bulan, Selama melakukan penelitian penulis menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada masyarakat, dengan itu penulis dapat mengetahui sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan mengenai implementasi Perda 21 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir dikecamatan tualang, kabupaten siak.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan 1 (Seksi Andadalin dan Perparkiran Dinas perhubungan) dan informan 2 (Koordinator Parkir Dikecamatan tualang):

Pertanyaan 1: Apakah golongan dan jenis retribusi pada bagian sektor retribusi ditepi jalan umum adalah retribusi jasa umum?

“... Ibu Devi (Seksi Andadalin dan perparkiran dinas perhubungan) iya benar, bahwa jenis retribusi yang ada ditepi jalan umum tersebut merupakan jenis retribusi jasa umum...”

“... Bapak Ismail (Koordinator Parkir Di Kecamatan Tualang) iya betul , Parkir di tepi jalan umum itu adalah jenis retribusi jasa umum...”

Pertanyaan 2: Apakah Objek Retribusi parkir di pungut atas pelayanan penyediaan parkir , fasilitas yang diberikan telah sesuai ? (pertanyaan 2, jawabannya sudah menjawab pertanyaan 3,4,5)

“... Ibu Devi (Seksi andadalin dan perparkiran dinas perhubungan) Iya benar, pemungutan dilakukan apabila pengendara memparkirkan kendaraanya di area parkir dan saya rasa fasilitas yang diberikan sudah sesuai ”

“... Bapak Ismail (Koordinator Parkir Di Kecamatan Tualang) Iya benar, kalau parkir baru dikutip kalau tidak ngapain dimintak harus bayar. Pelayanan sudah sesuai rasa saya”

Dalam penelitian ini yang peneliti lakukan mengenai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 ternyata tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Yaitu tentang Objek Retribusi Parkir yang sangat tidak sesuai berbicara tentang objek retribusi parkir di tepi jalan umum sama halnya dengan sarana dan prasarana fisik perparkiran. Keadaan

lingkungan sekitar menjadi bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik atau bukti fisik hal ini adalah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan parkir. Contoh sarana dalam pelayanan parkir seperti, peralatan kantor, atribut juru parkir, identitas diri dan karcis parkir.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (fasilitas penunjang / pendukung). Contoh prasarana dalam pelayanan parkir seperti, Gedung Peraturan Daerah (PD) parkir, titik/ lahan parkir, kendaraan operasional, marka parkir (tanda/garis pembatas ruang parkir), perpustakaan yang ada di lokasi-lokasi pemungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pertanyaan 3: Apakah Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan karcis yang telah diporporasi ?

“...Ibu Devi (Seksi andadalin dan perpustakaan dinas perhubungan)

Iya , harus menggunakan karcis itu tanda bukti pembayaran dan tolak ukur pendapatan dari retribusi”

“...Bapak Ismail (Koordinator Parkir di Kecamatan Tualang)

Karcis itu hanya formalitas saja , tidak terlalu perlu. Asal kan juru parkir melayani dengan baik “

“...Bapak Kohar (Juru Parkir Dipasar Tuah Serumpun)*iya biasa pakai karcis Cuma lagi habis, baru saja habis”*

“...Bapak Sirait (Juru Parkir Dipasar Malam) *Tidak pernah pakai karcis , karena tidak pernah diberi oleh koordinator ataupun dinas perhubungan”*

“... Saudara Dhita(Masyarakat pengguna jasa parkir)*selama saya parkir disini di pasar tuah serumpun ini belum ada istilah pemberian karcis oleh juru parkir, jangan kan karcis mengingatkan untuk kunci stang saja tidak ada yang parah nya kadang banyak yang parkir disini mengeluarkan motor nya sendiri padahal kadang sulit”*

“... Saudara Nani (Masyarakat Pengguna Jasa Parkir) *Tidak ada dikasih , saya selalu pergi kepasar malam untuk belanja dan parkir disini tidak pernah ada yang kasih karcis”*

Penulis menyimpulkan kurangnya sosialisai oleh dinas perhubungan kepada juru parkir dan masyarakat bahkan kepada koordinator juru parkir tentang Perda Nomor 21 Tahun 2011 bahwa pemungutan retribusi parkir harus menggunakan Karcis yang telah diporporasi ini juga bertujuan agar tidak ada pemungutan liar. Padahal karcis parkir merupakan bukti fisik wajib saat melakukan retribusi parkir, saat ini dapat dilihat dimana-mana bahwa pengguna karcis parkir tidak lagi efektif. Padahal karcis parkir sangat berperan dalam menunjang pelayanan parkir, sebab pada karcis tersebut tertera nominal tarif parkir yang harus dibayar oleh pengguna lahan parkir.

Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dimana faktor-faktor tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya

kegagalan dan keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori George C. Edward III (Dalam Suharno, 2013) mengajukan empat variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui faktor yang menjadi penghambat kebijakan tersebut.

Pertanyaan 1: Apakah Komunikasi menjadi faktor penghambat implementasi dari kebijakan Perda Nomor 21 Tahun 2011 ?

“...Ibuk Devi(Seksi andadalin dan perparkiran dinas perhubungan) Saya rasa tidak, kami selalu mengadakan sosialisasi walaupun terkadang hanya setahun sekali “

“...Bapak Ismail (Koordinator Parkir Kecamatan Tualang) Saya selalu datang kelokasi parkir melihat kinerja juru parkir”

“...Bapak Josep(Juru Parkir di pasar Tuah serumpun) Dinas Perhubungan jarang melakukan pembinaan dan pengawasan disini kalau pak ismail ada walaupun sekekali”

“...Ibuk Nani (masyarakat pengendara pasar terminal baru) setahu saya tidak ada sosialisasi yang dilakukan dinas perhubungan , mungkin banyakk masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana keuangan atau proses dalam perparkiran ini”

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus di ketahuinya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus di informatkan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ini juga memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, sebab Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam upaya menjawab kebutuhan daerah akan peraturan yang bisa memberi sumbangsih dalam Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Dalam penelitian wawancara yang saya lakukan, saya menyimpulkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sebagai pelaksana retribusi parkir, yang mana kurangnya sosialisasi dan komunikasi kepada para pelaku retribusi parkir baik itu juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir. Seperti penggunaan karcis yang telah di porporasi saat pemungutan retribusi parkir, kurangnya pemngawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dilapangan membuat juru parkir bekerja tidak sesuai apa yang telah diatur didalam Perda Nomor 21 Tahun 2011. Dari segi finansial juga dapat merugikan masyrakat tanpa penggunaan karcis masyarakat sering memberikann jasa parkir ke juru parkir liar yang tidak menjadi anggota juru parkir sebenarnya. Kemudian tidak ada nya pemberitahuan lokasi pemungutan parkir yang seharusnya dimuat dalam suatu peraturan daerah bukan surat tugas sehingga masyarakat mengetahui secara jelas lokasi

Pertanyaan 2: Apakah Sumber Daya menjadi faktor penghambat implementasi dari kebijakan Perda No 21 Th 2011 ?

“...Ibuk Devi(seksi andadalin dan perparkiran dinas Perhubungan) sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat , seperti kurang nya integritas juru parkir dalam bekerja dan enggan nya masyarakat untuk membayar retribusi
“

“...Bapak Ismail (koordinator parkir diKecamatan Tualang) Terkadang juru parkir saat dipantau baru bagus kerjanya kalau tidak iya asal-asalan”

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementasi. Tampak sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal. Sumber daya sebagai pendukung implemementasi kebijakan agar dapat dijalankan sesuai dengan harapan yaitu sumber daya manusia yakni kopetensi implementor.

PEMBAHASAN

Dari sisi kejelasan isi, menunjukkan bahwa Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Siak di perparkiran Kecamatan Tualang tidak ada masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari target realisasi pendapat hasil retribusi yang meningkat apalagi dari setoran yang dilakukan oleh Kecamatan Tualang yang tidak ada masalah maksudnya selalu sesuai target. Masalah lain terjadi kurangnya komunikasi atau pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan dengan juru parkir dan lingkungan di area parkir seharusnya dinas perhubungan harus juga berkomunikasi dengan instansi yang terkait kepada anggota Satpol PP ataupun pihak kepolisian kerjasa ini bertujuan untuk melakukan operasi gabungan dalam rangka menertibkan parkir-parkir liar yang marak terjadi dilapangan dan menertibkan masyarakat yang memparkir kendaraan di sembarangan tempat dengan tujuan memberikan efek jera kepada masyarakat.

Faktor-faktor penghambat implemementasi Perda Nomor 21 Tahun 2011 berdasarkan penelitiannya yaitu komunikasi, komponen dalam faktor komunikasi terdiri dari tiga aspek , yaitu transmisi, kejelasan, dan konsentensi. Transmisi dalam faktor komunikasi ini merupakan proses penyampaian informasi, informasi yang disampaikan dalam hal ini adalah isi dari kebijakan retribusi parkir ditepi jalan umum yang meliputi mekanisme pelayanan parkir yang benar, penyeteroran retribusi retribusi dan tarif retribusi. Penyampaian informasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada juru parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir agar mengetahui retribusi parkir yang benar sesuai dengan peraturan daerah agar tidak saling merugikan itu yang tidak dilakukan dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Kedua, kejelasan informasi yang diterima oleh juru parkir dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Juru parkir yang mengaku telah memahami isi dari peraturan tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak juru parkir yang melanggarnya dalam hal masyarakat pun telah mendapatkan informasi tentang kebijakan tersebut tetapi keterlibatan masyarakat dalam penghambat implemementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang masalah karcis dan selain itu masyarakat yang suka parkir sembarangan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Tualang Berdasarkan Perda Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat tujuan dari kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini belum mencapai hasil optimal. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi permasalahan parkir yang ada di kawasan Kecamatan Tualang seperti penataan parkir, parkir liar serta juru parkir yang tidak memenuhi syarat. Kurangnya sosialisasi oleh dinas Perhubungan Kabupaten Siak tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepada para subjek retribusi. Kurangnya pengawasan juga membuat juru parkir tidak bertugas sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dengan tidak memiliki identitas yang kurang lengkap itu dilihat dari tidak memakai kartu tanda pengenal dan seragam parkir, selain itu para juru parkir sangat belum maksimal saat melaksanakan pelayanan tidak mengingatkan para pengendara untuk mengunci stang sepeda motor atau mengunci pintu mobil dan tidak menggunakan karcis itu sangat melanggar ketentuan dan uraian juru parkir. Dari segi masyarakat, masalah yang sering terjadi banyak masyarakat di Kecamatan Tualang yang tidak meremarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan itu juga membuat kemacetan terjadi dan pemungutan-pemungutan terjadi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis. Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan publik .
2. Bagi Dinas Perhubungan, melaksanakan peranannya, membantu dan memperluas pengambilan tindakan maupun putusan perbaikan untuk selanjutnya, terutama bagi peningkatan kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir maupun masyarakat.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, untuk meneliti lebih mendalam mengenai peranan Peraturan Daerah sebagai kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas perparkiran di Kecamatan Tualang. Penelitian ini sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait pada masa mendatang terutama meningkatkan kualitas kebijakan publik melalui partisipasi masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Supentri, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, dan Bapak Drs. Zahirman, M.H dan Bapak Haryono, M.Pd selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. H. Zahirman, M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd , Separen, S.Pd., M.H, Bapak Indra Primahardani, MH., Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Teristimewa dan paling utama kepada kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Khairudin dan Ibunda Dariah, abang Erwan Candra dan kakak Erwinda Syafitri ,atas dukungan dan pengorbanan selama ini, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, Abuzar. 2014. *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit IN MEDIA.
- Ahmadi, Rumlan. 2016. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Ida, Zuraida. 2012. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Jan, Jonker. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rudy, Suhartono.2010. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.